

URGENSI REDENOMINASI NILAI RUPIAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Erissa Nilasari

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
E-mail: erissanilasari@ymail.com

Abstrak : Untuk mengatasi inflasi berbagai negara didunia melakukan redenominasi mata uang, yaitu penyederhanaan nilai mata uang. Rencana redenominasi nilai rupiah di Indonesia bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan transaksi keuangan, meningkatkan martabat rupiah, serta membuat kesetaraan ekonomi Indonesia dengan regional. Dari segi syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan redenominasi yaitu kestabilan ekonomi dan tingkat inflasi , Indonesia sudah dapat melaksanakan redenominasi. Namun, banyaknya persiapan dan biaya yang harus dikeluarkan dari kebijakan redenominasi ini serta kurang siapnya masyarakat Indonesia dalam menghadapi kebijakan ini, maka dalam waktu dekat ini kebijakan redenominasi nilai rupiah belum terlalu penting untuk dilaksanakan.

Abstract : In order to overcome inflation, many countries are employing currency redenomination policy. This is a public policy measure that simplifies the use and managing of the national currency of a country, through its expression in a new and smaller equivalent scale. The goal of rupiah redenomination is to simplify the currency scale in accounting record systems and monetary statements, to strengthen rupiah value, and also to promote the equal growth of social and economical development of the country. Beforehand, low average inflation and economy stability as the demanded factors for currency redenomination policy should be performed by the respected countries. Indonesia is already in this state of ideal economy condition for the policy. In spite of that; due to inadequate preparations, insufficient expense planning, and lack of citizen promptitude; therefore, rupiah redenomination policy is not immediately employed.

Kata kunci : *Uang, inflasi, redenominasi.*

Pendahuluan

Dalam perekonomian uang memiliki peranan yang sangat penting. Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi : (1) sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/penyimpan kekayaan.¹

Mata uang harus merupakan sesuatu yang benar dan sehat (*real sound money*). Mata uang yang sehat nilainya stabil apabila harga-harga barang yang dinyatakan dengan kesatuan uang tersebut pada umumnya tetap tidak mengalami perubahan , yang berarti dalam waktu yang agak lama. Disamping itu, uang sehat memperlihatkan perbandingan atau kurs yang tetap terhadap kesatuan-kesatuan uang luar negeri yang penting artinya untuk perdagangan internasional seperti

Dollar, Poundsterling, Mark Jerman, dan lain-lain. Sedangkan uang yang tidak sehat adalah uang yang nilainya seringkali turun dan tidak stabil.²

Di Indonesia, mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Mata uang rupiah yang beredar saat ini terdiri dari berbagai pecahan nominal yang paling kecil yaitu Rp 50 sampai dengan nominal yang paling besar yaitu Rp 100.000. Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya transaksi didalam masyarakat. Namun meningkatnya transaksi tersebut juga menyebabkan angka digit rupiah yang digunakan juga semakin banyak. Hal ini berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dalam transaksi keuangan, karena masyarakat akan direpotkan untuk

¹ Nopirin, Ekonomi Moneter (Buku 1), 2000, Yogyakarta : BPFE, hlm.2

² Syafruddin Prawiranegara, Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam : Kumpulan Karangan Terpilih 2, 1988, Jakarta : CV. Haji Masagung, hlm. 298

membawa jumlah uang yang besar ketika melakukan transaksi keuangan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam sistem pembayaran non tunai pada akhirnya juga akan mengakibatkan permasalahan dalam pencatatan, karena dalam sistem pencatatan terdapat pembatasan angka digit yang dapat ditolerir oleh sistem pembayaran dan sistem pencatatan. Angka digit yang banyak juga akan memberikan persepsi rendahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing.

Sebagai pemegang otoritas moneter, negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menstabilkan nilai mata uang. Negara harus mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mengimbangi perkembangan sektor moneter dan sektor riil. Memahami betapa besar pengaruh moneter terhadap perekonomian dan hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dalam sebuah tatanan ekonomi tertentu dalam sebuah negara perlu dilakukan pengaturan di bidang moneter.³ Suatu kebijakan moneter pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴

Kebijakan moneter juga untuk mengatur jumlah uang beredar (JUB) baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek dalam kebijakan moneter pada umumnya adalah melalui proses penawaran uang maupun mempengaruhi jumlah uang beredar dan agar sesuai dengan sasaran moneter yang diinginkan.⁵

Salah satu kebijakan moneter adalah dengan melakukan penyederhanaan nilai mata uang. Penyederhanaan nilai mata uang merupakan salah satu kebijakan moneter yang tentu akan berpengaruh dan berefek terhadap kebijakan ekonomi lainnya. Meski belum ada studi rinci, namun keuntungan dan kerugian proses penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) pasti ada. Akan tetapi yang perlu dicermati

adalah bagaimana menjaga kondisi makro tetap stabil.⁶

Pemerintah Indonesia akan melakukan kebijakan redenominasi terhadap nilai rupiah. Hal ini disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia melalui siaran pers bersama antara kementerian keuangan dan Bank Indonesia pada tanggal 23 Januari 2013 yang bertajuk “Kebijakan Redenominasi Bukan Sanering”. Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa redenominasi pada prinsipnya adalah penyederhanaan digit mata uang tanpa mengurangi daya beli masyarakat, harga atau nilai tukar mata uang tersebut terhadap harga barang dan atau jasa. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengubah seluruh penggunaan dan penyebutan rupiah dalam pencatatan transaksi, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, surat berharga, dokumen keuangan, akta dan dokumen lainnya.⁷

Pada siaran pers tersebut juga dijelaskan bahwa kebijakan redenominasi yang akan dilaksanakan berbeda dengan sanering. Dalam redenominasi, penyederhanaan nilai nominal rupiah disertai dengan penyederhanaan nominal harga sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. Hal ini berbeda dengan sanering, dimana penyederhanaan nilai nominal rupiah tidak disertai dengan penyesuaian harga sehingga daya beli masyarakat menurun.⁸

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip detikFinance, Rabu (23/1/2013), ada 3 kebijakan mata uang yang pernah dilakukan di Indonesia. Pertama, pada awal 1950, terdapat peristiwa 'Gunting Syafruddin'. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah

³ Akhand Akhtar Hossain, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia – Pasifik (Terjemahan *Central Banking and Monetary Policy in the Asia Pasifik* oleh Haris Munandar), 2000, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 14.

⁴ Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, 2008, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 11

⁵ Boediono, Ekonomi Moneter “ Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi”, 1994, Yogyakarta : BPF, hlm.137

⁶ Asyari Hasan, Penyederhanaan Nilai Mata Uang yang Berkeadilan dan Implikasinya terhadap Perekonomian (Studi Kasus Kebijakan Moneter Indonesia Tahun 1952 – 1965), graduate.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 20 februari 2014.

⁷ Siaran Pers Bersama Kementerian Keuangan – Bank Inonesia “ Kebijakan Redenominasi bukan Sanering “, tanggal 23 Januari 2013

⁸ *Ibid*

uang beredar yang ada di masyarakat.⁹ Melalui langkah ini, uang beredar akan berkurang langsung sebesar persentase tertentu, sedangkan sisanya diganti dengan surat berharga.¹⁰

Kedua, kebijakan sanering pada 25 Agustus 1959. Kebijakan ini praktiknya dilakukan dengan menurunkan nilai uang kertas pecahan besar yaitu Rp 1.000 dan Rp 500 menjadi bernilai hanya 10%. Seperti Rp 1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp 100, Rp 500 diturunkan nilainya menjadi Rp 50, sementara pecahan lainnya bernilai tetap. Pemerintah menerapkan kebijakan sanering ini dengan tujuan mengurangi jumlah uang beredar yang melonjak akibat kebijakan fiskal yang ekspansif yang dibiayai dengan pencetakan uang. Kemudian ketiga adalah kebijakan redenominasi pada 13 Desember 1965. Kebijakan ini dilakukan pemerintah secara tiba-tiba. Pemerintah menerbitkan pecahan dengan desain baru Rp 1 dengan nilai atau daya beli masyarakat setara Rp 1.000 lama.¹¹

Keberhasilan redenominasi yang akan dilaksanakan tentunya tergantung pada kondisi perekonomian Indonesia. Dalam hal ini setidaknya Indonesia harus melihat pengalaman dari negara-negara yang pernah melaksanakan redenominasi mata uang.

Redenominasi

Redenominasi mata uang adalah suatu proses dimana suatu unit baru dari uang menggantikan unit yang lama dengan suatu rasio tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan mengeluarkan angka nol atau memindahkan beberapa desimal poin dari mata uang ke sebelah kiri dengan tujuan untuk mengoreksi mata uang dan struktur harga serta meningkatkan kredibilitas dari mata uang lokal.¹² Redenominasi adalah penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar uang tersebut disertai dengan penyesuaian harga komoditas dipasaran dan nilai valuta asing.

Redenominasi adalah suatu kebijakan berupa tindakan untuk melakukan penyederhanaan sejumlah nominasi atau satuan nominal dari mata uang, tanpa mengurangi nilai intrinsiknya. Tujuannya tentu saja untuk mengurangi tingginya tingkat denominasi mata uang yang beredar di masyarakat. Penyederhanaan nominal pada suatu mata uang diharapkan akan menaikkan tingkat kepraktisan dalam bertransaksi, sehingga diharapkan pula akan meningkatkan minat individu untuk semakin lama memegang kekayaan tunai ke dalam bentuk mata uang tertentu.¹³

Tujuan dari redenominasi nilai rupiah antara lain : (1) meningkatkan martabat rupiah, (2) menyederhanakan mata uang, (3) memudahkan dalam pencatatan keuangan, dan (4) membuat kesetaraan ekonomi Indonesia dengan regional.¹⁴

Untuk melaksanakan redenominasi nilai uang ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan penyederhaan nilai tukar. Tiga persyaratan itu adalah : (1) kondisi ekonomi yang stabil, (2) inflasi yang terjaga rendah dan (3) adanya jaminan stabilitas harga.¹⁵

Dalam 85 tahun terakhir beberapa negara di dunia pernah melakukan redenominasi terhadap mata uangnya. Negara yang pertama kali melakukan redenominasi adalah negara Jerman pada tahun 1923 karena hiperinflasi dengan mengurangi dua belas angka nol.¹⁶

Salah satu negara yang sukses melakukan redenominasi mata uangnya adalah Turki. Turki tercatat pernah sukses melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Jadi redenominasi yang dilakukan Turki adalah mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2005. kebijakan redenominasi ini

⁹ www.detikfinance.com. Diakses tanggal 12 April 2013

¹⁰ Aulia Pohan, Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia, 2008, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hlm 50.

¹¹ www.detikfinance.com. Diakses tanggal 12 April 2013

¹² Agung Budilaksono, Redenominasi mata uang : Potret kecil sejarah, teori dan Praktik serta dampaknya, www.bpk.depkeu.go.id, diakses tanggal 10 februari 2014.

¹³ Anonim. Sanering. www.jakarta.go.id. Diakses tanggal 10 februari 2014

¹⁴ Bambang Juanda, Kebijakan Redenominasi Rupiah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Umum di Dept. Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor tanggal 17 April 2013.

¹⁵ Anonim, Kajian Tentang Rencana Redenominasi dalam Sistem Keuangan jangka Panjang di Indonesia. <http://download.portal.garuda.org>, diakses tanggal 13 Maret 2013.

¹⁶ Frederic. S. Mishkin, Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan (Terjemahan The Economic Money, Banking and Financial Markets) oleh Lana Soelistyaningsih dan Beta Yulianita G, 2009, Jakarta : Salemba Empat, Hlm.340-341.

dilakukan untuk menekan laju inflasi Turki yang sangat tinggi sejak tahun 1970-an.¹⁷

Selain negara tersebut, ada beberapa negara lain yang sukses melakukan penyederhanaan mata uang seperti negara-negara pecahan Uni Soviet yaitu Azerbaijan yang pada 2009 menyederhanakan 5.000 manat menjadi 1 manat. Pada tahun yang sama Turkmenistan melakukan redenominasi yang sama dengan Azerbaijan.¹⁸

Disamping itu, tidak sedikit negara yang gagal melakukan redenominasi mata uang. Setidaknya ada lima negara yang pernah gagal menerapkan redenominasi, yaitu Rusia, Argentina, Brasil, Zimbabwe dan Korea Utara. Faktor penyebab kegagalan redenominasi tersebut antara lain waktu implementasi kebijakan yang kurang tepat, khususnya dalam hal tren fundamental perekonomian di negara masing-masing. Disisi lain, lima negara tersebut memiliki kebijakan makro yang tidak sehat antara lain bank sentral yang sangat ekspansif membiayai anggaran pemerintah, khususnya Zimbabwe serta kebijakan fiskal yang ekspansif (Brasil dan Zimbabwe).¹⁹

Khusus untuk Rusia, Argentina, Zimbabwe serta Korea Utara yang gagal menerapkan redenominasi disebabkan oleh stok uang baru tidak tersedia saat warga negaranya ingin menukarkan uang, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang redenominasi, serta perekonomian yang tidak stabil. Disisi lain, negara-negara tersebut juga memiliki inflasi yang tidak terkendali, pemerintah tidak bisa mengatur stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan barang serta nilai kurs valuta asing dalam keadaan tidak stabil.²⁰

Perbedaan Redenominasi dan Sanering

Wacana akan dilakukan redenominasi nilai rupiah tentunya mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang beranggapan

redenominasi sama dengan sanering, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.

Hal ini berbeda dengan sanering. Istilah sanering berasal dari bahasa Belanda *geld sanering politiek*, yang secara harfiah berarti politik penyehatan uang, sedang dalam bahasa Inggris disebut *monetary reforms*, artinya reformasi dalam bidang moneter. Pengertian *monetary reforms* mencakup juga kebijakan devaluasi.²¹

Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung tinggi. Hal tersebut disebabkan perekonomian Indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan tindakan sanering yang dikenal dengan sebutan gunting Syafrudin.²²

Kemudian pemerintah kembali melakukan tindakan sanering yang kedua pada tahun 1959, tepatnya pada 25 Agustus 1959. Hal ini dilakukan untuk menekan laju inflasi sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PEPRU) No. 2 dan No. 3 tahun 1959 yang pada intinya melakukan pemotongan nilai uang kertas dari Rp. 500,- dan Rp. 1000,- menjadi Rp. 50,- dan Rp. 100,-.²³

Selanjutnya pemerintah untuk yang ketiga kalinya melakukan tindakan sanering dengan sebab dan alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebabkan oleh inflasi. Kebijakan sanering ini dilakukan oleh pemerintah tepatnya pada 13 Desember 1965. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada rupiah dari nilai Rp. 1000,- (uang lama) menjadi Rp. 1,- (uang baru).²⁴

Kebijakan sanering ini dilaksanakan agar Indonesia bisa keluar dari keadaan perekonomian yang sangat kacau sepanjang periode 1960 – 1965, dimana perekonomian Indonesia pada beberapa sektor boleh dibilang

¹⁷ Herdaru Purnomo, Ini Dia Negara-negara Yang Sukses Terapkan Redenominasi Mata Uang, <http://finance.detik.com>, diakses tanggal 10 Maret 2014.

¹⁸ Anonim, Meruntuhkan nol meningkatkan kredibilitas. <http://nasional.sindonews.com>, diakses tanggal 10 Maret 2014.

¹⁹ Anonim. Ada 5 negara yang Gagal Terapkan Redenominasi. <http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses tanggal 10 Maret 2014.

²⁰ *Ibid*

²¹ Anonim. Sanering. www.jakarta.go.id. Diakses tanggal 10 Februari 2014

²² Anonim. Konsep Nilai Sanering. <http://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 10 Maret 2014

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

mengalami stagnasi sementara pertumbuhan ekonomi hanya berkisar rata-rata 2% per tahun.²⁵

Dari uraian diatas maka terlihat perbedaan antara redenominasi dengan sanering. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara redenominasi dan sanering adalah sebagai berikut :²⁶

1. Dilihat dari pengertiannya, redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Sanering rupiah adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga barang-barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.
2. Dilihat dari dampaknya bagi masyarakat, pada redenominasi tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama, sedangkan pada sanering menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
3. Dilihat dari sisi tujuannya, redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi, kemudian tujuan berikutnya adalah mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Sanering rupiah bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga.
4. Dilihat dari nilai uang terhadap barang, pada redenominasi nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan. Pada sanering, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.
5. Dilihat pada kondisi saat dilakukan, redenominasi dilakukan saat makro ekonomi stabil, ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali. Sanering dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi)
6. Dilihat dari masa transisi, redenominasi dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pada sanering tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.

Tahapan dalam redenominasi

Dalam melaksanakan redenominasi, maka diperlukan beberapa tahapan. Bank Indonesia (BI) mengakui jika penerapan redenominasi tidaklah mudah sehingga harus melalui proses. BI telah menyiapkan tahapan-tahapan penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi ini mulai 2011-2020.²⁷

1. Tahun 2010

Pada tahun ini pertama kali wacana redenominasi muncul. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menyatakan akan menghilangkan tiga angka nol di belakang rupiah. Langkah ini untuk menyederhanakan penyebutan satuan harga atau nilai rupiah

2. Tahun 2011-2012.

Bank Indonesia mulai melakukan pembahasan dengan pemerintah perihal rencana redenominasi. Hasilnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi. Periode ini juga sebagai masa sosialisasi. BI juga menyiapkan berbagai macam hal seperti menyangkut akuntansi, pencatatan, sistem informasi. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), rencana percetakan uang dan distribusinya juga sudah mulai berlangsung

3. Tahun 2013-2015.

Periode ini merupakan masa transisi. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia pada 23 Januari 2013, resmi menggelar serangkaian sosialisasi rencana redenominasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa redenominasi bukanlah pemangkasan nilai mata uang (sanering) tapi penyederhanaan dengan menghilangkan beberapa nol. Pada masa ini akan ada dua jenis mata uang, yakni pecahan lama dan pecahan baru pascarendenominasi. Hal ini bertujuan membiasakan masyarakat dalam penggunaan mata uang baru nantinya baik dalam pembayaran maupun pengembalian transaksi. Sebagai contoh, harga produk senilai Rp 10.000 akan ditulis dalam dua

²⁵ Aulia Pohan, *Op. Cit*, hlm. 105 – 106.

²⁶ Anonim, Perbedaan Redenominasi Rupiah Dengan Sanering Rupiah, www.redenominasirupiah.com, diakses tanggal 13 Januari 2014.

²⁷ Jadwal pelaksanaan redenominasi rupiah, <http://bisnis.liputan6.com>, diakses tanggal 22 Januari 2014

harga yaitu Rp 10.000 (rupiah lama) dan Rp 10 (rupiah baru). BI juga akan perlahan-lahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.

4. Tahun 2016-2018

Pada periode ini, pemerintah menargetkan uang saat ini (rupiah lama) akan benar-benar tak beredar lagi. BI akan melakukan penarikan uang lama secara perlahan pada masa transisi.

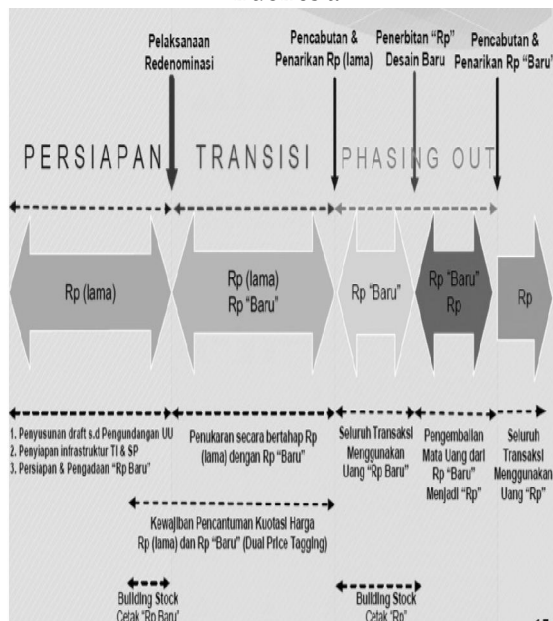
5. Tahun 2019-2020

Pelaksanaan redenominasi mulai terjadi. Tahapan ini disebut phasing out, yakni saat dilakukan pengembalian mata uang rupiah dengan kata 'baru' menjadi rupiah. BI akan menyebarkan penggunaan mata uang baru sebagai pengganti uang lama.

Secara lebih jelas, untuk tahapan pelaksanaan redenominasi nilai rupiah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1

Tahapan Kegiatan Redenominasi Nilai Rupiah di Indonesia



Sumber : Bank Indonesia, Materi Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah (2013)

Inflasi dan Redenominasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.²⁸ Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan

indeks harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi dan harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah.²⁹ Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain (1) Indeks biaya hidup (*consumer price index*), (2) indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*) dan (3) GNP deflator.³⁰

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, maka inflasi dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu : merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*) dan inflasi tinggi (*hyper inflation*).³¹

Creeping inflation biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-harga pada minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efek inflasi menengah lebih berat daripada inflasi merayap.³²

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.³³

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya.³⁴ Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujud dalam pasaran. Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja

²⁹ Aulia Pohan, *Op.Cit*, hlm. 52

³⁰ Nopirin, *Op.Cit*, hlm.25

³¹ Nopirin, *Op.Cit*.hlm. 27

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi, 2001, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 303

²⁸ Prathama Raharja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), 2008, Jakarta : LPFE UI, hlm. 359

penyakit dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti ini permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan menimbulkan kenaikan harga-harga.³⁵

Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya.³⁶

Sampai pada tingkat tertentu, inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan outputnya. Kendatipun belum dapat dibuktikan secara matematis, umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Jika inflasi melebihi angka 10%, umumnya sudah mulai sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hiperinflasi (*hyperinflation*), yaitu inflasi yang $\geq 100\%$ per tahun.³⁷

Ada beberapa masalah sosial (biaya sosial) yang muncul dari inflasi yang tinggi yaitu : (1) menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, (2) memburuknya distribusi pendapatan dan (3) terganggunya stabilitas ekonomi.³⁸

Dibidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam penerangan dana masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun. Disamping itu, suku bunga riil yang relatif rendah dibandingkan dengan suku bunga riil di luar negeri dapat menimbulkan pengaliran modal ke luar negeri.

Masyarakat akan menyimpan uangnya di luar negeri. Laju inflasi yang sangat tinggi (*hyperinflation*) akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan anggaran belanja dan perencanaan kredit yang akan memengaruhi keadaan keuangan bank-bank.³⁹

Dalam kaitannya dengan redenominasi, salah satu syarat diberlakukannya redenominasi adalah inflasi yang terjaga rendah. Tabel berikut memperlihatkan tingkat inflasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Tabel 1. Tingkat Inflasi Indonesia selama sepuluh tahun terakhir

Tahun	Tingkat Inflasi
2004	6,40
2005	17,11
2006	6,60
2007	6,59
2008	11,06
2009	2,78
2010	6,96
2011	3,79
2012	4,30
2013	8,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014) : Data diolah

Jika diperhatikan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir, maka dapat dikatakan stabil, dimana inflasi rata-rata berada pada tingkat yang rendah ($< 10\%$ per tahun) walaupun pada tahun 2005 dan tahun 2008 inflasi di Indonesia berada pada tingkat menengah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 dan tahun 2008 terjadi kenaikan harga minyak dunia, hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang-barang secara umum, sehingga inflasi di Indonesia pada tahun 2005 dan 2008 berada pada tingkat keparahan yang sedang/ menengah. Akan tetapi jika dilihat dari lima tahun terakhir, maka dapat dikatakan inflasi relatif rendah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk melakukan redenominasi nilai rupiah, karena inflasi yang rendah dan terjaga merupakan salah satu syarat untuk diberlakukannya redenominasi.

³⁵ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, hlm. 303

³⁶ Sadono Sukirno, *Op. Cit*, hlm. 305

³⁷ Prathama Raharja dan Mandala manurung, *Op.Cit*, hlm. 371

³⁸ *Ibid*

³⁹ Aulia Pohan. *Loc. Cit*

Redenominasi dan Stabilitas Ekonomi

Kondisi ekonomi yang stabil juga merupakan persyaratan dalam pelaksanaan redenominasi. Hal ini dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhan Ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian.⁴⁰ PDB dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.⁴¹ PDB dianggap sebagai indikator luas untuk output dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (tahun 2004 – tahun 2013)

Tabel 2. Nilai Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2004 – 2013 (dalam miliar rupiah)

Tahun	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	PDB Atas dasar Harga Konstan
2004	2.295.826,20	1.656.516,80
2005	2.774.281,10	1.750.815,20
2006	3.339.216,80	1.847.126,70
2007	3.950.893,20	1.964.327,30
2008	4.948.688,40	2.082.456,10
2009	5.606.203,40	2.178.850,40
2010	6.446.851,90	2.314.458,80
2011	7.419.187,10	2.464.566,10
2012	8.229.439,40	2.618.938,40
2013	9.083.972,20	2.770.345,10

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014) : Data diolah

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa selama sepuluh tahun terakhir nilai PDB Indonesia mengalami kenaikan, yang berarti nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian Indonesia selalu mengalami kenaikan.

Hal ini sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2006 – 2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi

	(%)
2006	5,5
2007	6,3
2008	6,0
2009	4,6
2010	6,1
2011	6,5
2012	6,3
2013	5,8

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014) : Data diolah.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2006– 2013, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Jadi stabilitas ekonomi Indonesia yang stabil ini juga merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk dapat melaksanakan redenominasi nilai rupiah.

Dampak Redenominasi

Rencana pemerintah untuk melakukan redenominasi terhadap nilai rupiah tentunya akan memberikan berbagai dampak kepada masyarakat. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh redenominasi nilai mata uang. Penelitian dari Seftiningtyas LH, yang meneliti mengenai pengaruh redenominasi terhadap inflasi, ekspor dan nilai tukar dengan memperhatikan beberapa negara yang pernah melakukan redenominasi mata uang menjelaskan bahwa dengan adanya redenominasi tingkat inflasi menjadi lebih baik. Redenominasi dikatakan dapat mendorong turunnya inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dapat meningkatkan kredibilitas nasional mata uang sehingga perekonomian dapat stabil. Jadi redenominasi tidak mempengaruhi nilai tukar jika tidak dihubungkan dengan tingkat inflasi. Namun redenominasi tidak mempengaruhi ekspor barang dan jasa. Tanpa adanya redenominasi ekspor masih dapat berkembang dengan baik.⁴²

Selain itu redenominasi tentunya juga akan berdampak terhadap konsumen, penelitian dari Harryadin Mahardika,dkk menjelaskan bahwa redenominasi tidak dapat memperbaiki citra rupiah, akan tetapi hal ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Masyarakat yang memiliki keuangan yang baik memiliki tanggapan positif terhadap redenominasi, tetapi sebaliknya

⁴⁰ N. Gregory Mankiw. Teori Makroekonomi (Terjemahan oleh Imam Nurmawan, S.E dan Wisnu C. Kristiaji,S.E), 2003, Jakarta : Erlangga, hlm. 16

⁴¹ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, hlm. 33

⁴² Seftiningtyas LH, Pengaruh Redenominasi Terhadap Inflasi, Ekspor dan Nilai Tukar, library.gunadarma.ac.id, diakses tanggal 23 Januari 2014.

masyarakat yang termarjinalkan secara ekonomi cenderung khawatir dengan adanya redenominasi akan menambah beban ekonomi.⁴³

Dampak negatif yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan redenominasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persiapan redenominasi besar dan resiko yang tinggi. Selain itu tentunya diperlukan biaya tambahan untuk mencetak uang baru. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kesalahan persepsi dalam masyarakat yang menyamakan antara redenominasi dan sanering. Hal ini tentunya akan menyebabkan kekacauan di masyarakat. Selain itu hal yang dikhawatirkan adalah *money illusion*, yaitu adanya salah persepsi dikalangan masyarakat. Dengan adanya redenominasi, masyarakat menganggap harga barang menjadi lebih murah dan akibatnya akan terjadi lonjakan permintaan terhadap barang. Hal ini malah akan mengakibatkan inflasi semakin tidak terkendali.

Urgensi Redenominasi

Jika dilihat dari syarat bagi suatu negara untuk melakukan redenominasi, memang pada saat ini Indonesia dapat melakukan redenominasi nilai rupiah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi Indonesia yang relatif rendah selama sepuluh tahun terakhir (Lihat Tabel 1) terutama tingkat inflasi lima tahun terakhir. Selain itu perekonomian Indonesia juga relatif stabil (Lihat Tabel 2 dan Tabel 3)

Namun seberapa pentingkah redenominasi nilai rupiah harus dilakukan? Penelitian dari M. Rival dengan judul “Pendapat Pedagang Besar di Banjarmasin Tentang Redenominasi” menjelaskan bahwa dari total keseluruhan responden, 40 % responden menyatakan setuju dengan pelaksanaan redenominasi dan sisanya sebesar 60% responden menyatakan tidak setuju dan netral.

Bagi responden yang setuju, mereka menganggap dengan adanya redenominasi akan mempermudah proses pencatatan dalam akuntansi dan mempermudah penghitungan. Namun, bagi mereka yang tidak setuju

menganggap redenominasi hanyalah merupakan upaya pencitraan bagi pemerintah Indonesia.⁴⁴

Jika dilihat dari efisien atau tidaknya maka dapat dikatakan untuk sekarang ini hal tersebut perlu dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan transaksi ekonomi yang terus meningkat dimasyarakat. Dengan menggunakan pecahan mata uang yang sekarang, maka jika menggunakan uang cash untuk pembelian suatu barang, misalnya mobil maka diperlukan uang yang sangat banyak dari segi nominalnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan negara-negara yang nominal mata uangnya sedikit.

Begitu pula dengan transaksi di pusat perbelanjaan ataupun perbankan, maka hal ini juga akan mempengaruhi proses pencatatan. Hal ini dikarenakan, sistem yang digunakan tentunya mempunyai keterbatasan. Begitu pula dengan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, atau yang menetap sementara waktu, mereka akan menganggap untuk membeli suatu barang diperlukan uang yang sangat banyak.

Namun untuk tujuan memperbaiki citra nilai rupiah, redenominasi tidak akan terlalu berpengaruh dalam nilai tukar rupiah. Memang nilai tukar rupiah khususnya terhadap US \$ dianggap lemah, yaitu Rp. 11.590 /US \$ (data per 30 April 2014). Hal ini juga berlaku pada mata uang asing lainnya. Akan tetapi redenominasi tidak bisa memperbaiki citra rupiah jika tidak dibarengi dengan inflasi yang rendah.⁴⁵ Jadi, pada intinya penanganan inflasi lah yang menjadi faktor utama dalam perekonomian suatu negara.

Selain itu, perlu diperhitungkan pula dampak yang akan terjadi jika kebijakan redenominasi dilaksanakan, jangan sampai nantinya Indonesia menjadi negara yang gagal dalam melaksanakan redenominasi. Jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan redenominasi maka kemungkinan besar yang akan dihadapi adalah inflasi yang tidak terkendalikan dan juga akan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian.

Jadi sebelum kebijakan redenominasi dilaksanakan maka seharusnya pemerintah

⁴³ Harryadin Mahardika, dkk, Dampak Redenominasi Rupiah Terhadap Konsumen (Research & Policy Insight FE UI No. 1 Tahun 2013). <http://www.fe.ui.ac.id>, Diakses tanggal 2 Maret 2014.

⁴⁴ M. Rival, “Pendapat Pedagang Besar di Banjarmasin Tentang Redenominasi”, Skripsi (Banjarmasin, IAIN Antasari, 2014), t.d.

⁴⁵ Penelitian Seftianingtyas LH yang meneliti pada beberapa negara yang telah melakukan redenominasi menyatakan bahwa redenominasi tidak bisa memperbaiki kredibilitas mata uang negara-negara tersebut jika tidak dibarengi dengan inflasi yang rendah.

memperhitungkan untung dan ruginya, jangan sampai kebijakan ini akan menyusahkan masyarakat terutama masyarakat dari sisi keuangannya masih rendah. Disamping itu perlu adanya kesiapan dari masyarakat terutama jangan sampai masyarakat menganggap redenominasi sama saja dengan sanering, dan jangan sampai dengan penyederhanaan mata uang tersebut memberikan persepsi dimasyarakat bahwa harga barang menjadi murah. Jika hal itu terjadi maka akan terjadi lonjakan permintaan barang, sedangkan produsen tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen sehingga inflasi semakin sulit untuk dikendalikan.

Kesiapan dalam menghadapi redenominasi tentunya sangat diperlukan pihak-pihak perbankan, industri, dan semua instansi yang sangat vital dalam transaksi keuangan, karena jika tidak siap dalam menghadapi redenominasi maka bisa terjadi kekacauan dalam proses pencatatan transaksi/pembukuan. Perlu adanya panduan dalam mengkonfigurasi sistem mesin yang dipergunakan untuk menyesuaikan dengan denominasi rupiah yang baru, misalnya penyesuaian pada mesin ATM, penyesuaian pada mesin kasir di toko-toko, penyesuaian pada mesin argometer taksi, penyesuaian pada literan otomatis di SPBU, dan lain sebagainya.

Begitu pula dengan kesiapan pemerintah, terutama dalam pengalihan uang lama ke uang dengan nominal yang baru. Tentunya pencetakan uang yang baru akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi pada intinya suksesnya kebijakan redenominasi tergantung pada pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaannya.

Jika dilihat dari berbagai aspek seperti banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam persiapan redenominasi, inflasi yang dalam beberapa tahun terakhir masih dalam batas yang relatif rendah, kestabilan ekonomi serta dampak yang tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, maka redenominasi masih belum terlalu penting untuk dilaksanakan.

Penutup

Pada dasarnya, dilihat dari beberapa aspek kebijakan redenominasi nilai rupiah di Indonesia sudah dapat untuk dilaksanakan. Akan tetapi dalam prosesnya diperlukan banyak persiapan dari pemerintah yang tentunya memerlukan biaya yang sangat banyak serta kesiapan masyarakat

untuk menghadapi redenominasi tersebut, jangan sampai kebijakan ini akan membuat masyarakat tambah mengalami kesusahan khususnya masyarakat yang masih mempunyai pendapatan rendah.

Dalam hal ini pemerintah harus menghitung kembali untung dan ruginya melaksanakan redenominasi nilai rupiah. Jika redenominasi akan memberikan lebih banyak kerugian maka kebijakan redenominasi belum tepat untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.

Daftar Pustaka

- Anonim, "Meruntuhkan nol meningkatkan kredibilitas".
<http://nasional.sindonews.com>, diakses tanggal 10 Maret 2014.
- Anonim, "Ada 5 negara yang Gagal Terapkan Redenominasi".
<http://bisniskeuangan.kompas.com>, diakses tanggal 10 Maret 2014.
- Anonim, "Sanering". www.jakarta.go.id, diakses tanggal 10 februari 2014
- Anonim, "Kajian Tentang Rencana Redenominasi dalam Sistem Keuangan jangka Panjang di Indonesia".
<http://download.portal.garuda.org>, diakses tanggal 13 Maret 201
- Anonim, "Perbedaan Redenominasi Rupiah Dengan Sanering Rupiah", www.redenominasirupiah.com, diakses tanggal 13 Januari 2014.
- Boediono, *Ekonomi Moneter* "Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi", BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Budilaksono, Agung. "Redenominasi mata uang : Potret kecil sejarah, teori dan Praktiknya serta dampaknya", www.bpk.depkeu.go.id, diakses tanggal 10 februari 2014.
- Hasan, Asyari. "Penyederhanaan Nilai Mata Uang yang Berkeadilan dan Implikasinya terhadap Perekonomian (Studi Kasus Kebijakan Moneter Indonesia Tahun 1952 – 1965)", graduate.uinjkt.ac.id, diakses tanggal 20 februari 2014.
- Hossain, Akhand Akhtar. *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia – Pasifik* (Terjemahan *Central Banking and Monetary Policy in the Asia Pasifik* oleh Haris Munandar), Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Juanda, Bambang, "Kebijakan Redenominasi Rupiah dan Dampaknya Terhadap

- Perekonomian Indonesia”, Makalah yang disampaikan pada Kuliah Umum di Dept. Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor tanggal 17 April 2013.
- LH, Seftiningtyas, “Pengaruh Redenominasi Terhadap Inflasi, Ekspor dan Nilai Tukar”, library.gunadarma.ac.id, diakses tanggal 23 Januari 2014.
- Mahardika, Harryadin dkk, “Dampak Redenominasi Rupiah Terhadap Konsumen” (Research & Policy Insight FE UI No. 1 Tahun 2013). <http://www.fe.ui.ac.id>, Diakses tanggal 2 Maret 2014.
- Mankiw, N. Gregory. *Teori Makroekonomi* (Terjemahan oleh Imam Nurmawan, S.E dan Wisnu C. Kristiaji, S.E), Erlangga, Jakarta, 2003.
- Mishkin, Frederic S, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan (Terjemahan The Economic Money, Banking and Financial Markets)* oleh Lana Soelistiyaningsih dan Beta Yulianita G, Salemba empat, Jakarta, 2009.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter (Buku 1)*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- , *Ekonomi Moneter (Buku 2)*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Pohan, Aulia, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- , *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam : Kumpulan Karangan Terpilih 2*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1998.
- Purnomo, Hendaru, “ Ini Dia Negara-negara Yang Sukses Terapkan Redenominasi Mata Uang”, <http://finance.detik.com>, diakses tanggal 10 Maret 2014
- Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, LPFE UI, Jakarta, 2008.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi (Edisi Kedua)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Siaran Pers Bersama Kementerian Keuangan – Bank Inonesia “ Kebijakan Redenominasi bukan Sanering “, tanggal 23 Januari 2013
www.detikfinance.com.
- <http://bisnis.liputan6.com>